

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memiliki tujuan dalam meningkatkan nilai kehidupan masyarakat pada suatu negara. Sehubungan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia 4 menyatakan bahwa:

“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. (p. 1)

Pembangunan nasional menggunakan dana dari pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Berdasarkan data dari Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2022, pendapatan negara tahun 2022 sebesar Rp1.840.660 miliar yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.506.918 miliar (81,87% dari pendapatan negara), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333.162 miliar (18,10% dari pendapatan negara) dan hibah sebesar Rp579 miliar (0,03% dari pendapatan negara). Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat pendapatan negara Indonesia terbesar terdapat pada penerimaan perpajakan yaitu 81,87% dari pendapatan negara.

Mengenai pengertian pajak, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut.

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (p. 2)

Hal ini berarti membuat pajak bersifat wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang bagi orang pribadi dan badan yang sudah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak tanpa mengharapkan imbalan secara langsung.

Penerimaan perpajakan ini menjadi kunci dalam pendapatan negara Indonesia sehingga kegiatan penagihan pajak ini menjadi hal penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Penagihan pajak adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar penanggung pajak melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak (DJP, 2021b). Tindakan penagihan pajak ini dilakukan dengan melakukan pengeluaran Surat Teguran, Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), pejabat lelang melakukan pengumuman lelang, dan pelaksanaan lelang.

Pada masa pandemi COVID-19, pembangunan nasional Indonesia mengalami gangguan yang cukup serius. Hal ini terjadi karena perubahan pendapatan negara yang sangat besar terutama pada bagian penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan ini sangatlah dipengaruhi oleh kegiatan penagihan pajak yang dilakukan petugas pajak, sedangkan kinerja petugas pajak ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan pandemi yang sedang terjadi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan penagihan pajak yang terjadi di masa

pandemi, penulisan karya tulis ini mengambil tinjauan atas penagihan pajak dengan cara meninjau pelaksanaan proses kegiatan penagihan pajak, realisasi penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan pajak dan halangan dalam proses kegiatan penagihan pajak dengan menggunakan objek Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Pengambilan objek Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat ini karena KPP membantu kegiatan penagihan pajak yang dilakukan oleh DJP Dan KPP Pratama Denpasar Barat ini tidak efektif dalam melakukan kegiatan penagihan pajak selama masa pandemi bulan Maret hingga Desember 2020. Hal ini terlihat dalam banyaknya jumlah penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis karya tulis yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENAGIHAN PAJAK DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah Karya Tulis Akhir (KTTA) sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses kegiatan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat?
2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat?
3. Apa saja halangan dalam proses kegiatan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, tujuan penulisan Karya Tulis Akhir (KTTA) sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.
2. Mengetahui realisasi penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.
3. Mengetahui halangan yang terdapat dalam proses kegiatan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada karya tulis ini, penulis ingin berfokus membahas ruang lingkup tentang proses pelaksanaan kegiatan penagihan pajak, realisasi penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan pajak, halangan-halangan yang terdapat dalam proses kegiatan penagihan pajak. Penulis mengambil objek Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan yang diharapkan penulis pada penulisan Karya Tulis Akhir (KTTA) sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi Akademisi

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca tentang pelaksanaan proses kegiatan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan karya tulis ini penulis dapat memahami dan mengerti lebih lanjut tentang kegiatan penagihan pajak yang terjadi selama masa pandemi

b. Bagi KPP Pratama Denpasar Barat

karya tulis ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum atas karya tulis, meliputi latar belakang karya tulis, rumusan masalah, tujuan penulis menulis karya tulis, ruang lingkup yang digunakan dalam penulisan karya tulis, manfaat karya tulis, metode yang digunakan untuk pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori, data, dan penelitian sebelumnya yang menjadi landasan pada penulisan karya tulis, meliputi data yang terkait dengan pelaksanaan proses kegiatan penagihan pajak, realisasi penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan pajak, dan halangan dalam proses kegiatan penagihan pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan dua metode penulisan, yaitu metode kepustakaan dan metode observasi. Beserta hasil pembahasan rumusan masalah penulisan yaitu pelaksanaan

proses kegiatan penagihan pajak, realisasi penerimaan pajak melalui kegiatan penagihan pajak, dan halangan dalam proses kegiatan penagihan pajak dengan pihak terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil tinjauan penulis secara menyeluruh terkait permasalahan yang dibahas yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.